



Alasan Interpelasi Formula E Harus Dijalankan

▶ Wagub Tawarkan PDIP dan PSI Diskusi

Gambir, Warta Kota

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membeberkan alasan mengapa sidang interpelasi Formula E Jakarta harus tetap dijalankan.

PSI akan tetap mendorong sidang interpelasi Formula E guna mempertanyakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Anggota PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, pihaknya tengah berfokus soal penggunaan APBD dalam pelaksanaan Formula E.

Bukan untuk menggagalkan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu.

"Sebenarnya dari pertama fokusnya bukan masalah balapannya. Fokus interpelasi ini bukan fokus pada balapannya, tapi fokus pada penggunaan uangnya," ucap Idris kepada wartawan, Rabu (20/4).

Pihaknya, kata dia, tak ada masalah sekalipun ajang Formula E tetap berjalan pada 4 Juni mendatang.

PSI menuntut pertanggungjawaban penyelenggara terhadap penggunaan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee.

"Jadi mau nanti balapan berjalan dan nanti juga selesai kita tetap pertanyakan. Karena itu tanggung jawab Rp 560 miliar yang dipakai dari APBD Dispora untuk membayar commitment fee, itu permasalahannya," ungkap dia.

"Dari Rp 560 miliar keuntungan buat apa aja, rencana-



Sebenarnya dari pertama fokusnya bukan masalah balapannya. Fokus interpelasi ini bukan fokus pada balapannya, tapi fokus pada penggunaan uangnya.

Idris Ahmad

nya dan dalam 3 tahun potensi keuntungan juga harus dibahas. Kami tetap mendorong agar (interpelasi) terjadi sebelum kegiatan balapannya," tutup dia.

Tawarkan Diskusi

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menawarkan Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta untuk ber-

diskusi, dibanding memakai hak interpelasi Formula E.

Hak interpelasi diajukan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencananya menggelar turnamen di tengah suasana Covid-19.

"Terkait usulan interpelasi di DPRD DKI Jakarta, apapun yang menjadi hak, kewenangan, kewajiban dari anggota dewan, tentu kami dari Pemprov DKI menghormati," kata Ariza di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (20/4).

"Tapi kami ingin hak-hak tersebut sejauh dapat dimusyawarahkan, kami diskusikan dan selesaikan bersama-sama," lanjut mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Meski anggota dewan memiliki sejumlah hak seperti interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, namun tidak mesti hak-hak tersebut digunakan. Sekalipun, kata Ariza, hak itu telah diatur dalam UU.

"Peraturan itu merupakan hak dewan, namun kami berharap semua permasalahan di Kota Jakarta apapun itu dapat diselesaikan antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI serta melibatkan masyarakat. Tentu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Jakarta dan bersama-sama juga kita bersinergi dan berkolaborasi membangun kota Jakarta," jelas Ariza.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak pimpinan dewan untuk kembali menggulirkan rapat paripurna interpelasi Formula E. (faf)